



## PERAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MENGATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN AKIBAT KEMISKINAN

**Nadila Putri<sup>1</sup>; Muhammad Riski Smith<sup>2</sup>; Muhammad Ikbal<sup>3</sup>; Apryanti<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>4</sup>Manajemen, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Correspondence Email: [nadilaaputri2311@gmail.com](mailto:nadilaaputri2311@gmail.com)

**Received:** 10 Juli 2024

**Accepted:** 10 Agustus 2024

**Published:** 25 September 2024

---

### Abstract

*The education gap due to poverty is a multidimensional problem influenced by economic, geographical and structural policy factors. Although various studies have highlighted these determinants, the role of social institutions in addressing education disparities has received less systematic attention. This study aims to examine in depth the strategic contribution of social institutions in reducing inequality in access and quality of education for vulnerable groups. Using a qualitative approach with the Systematic Literature Review (SLR) method, this study analyzes scientific publications from the Dimensions and Scopus databases in the period 2020-2025. The analysis shows that social institutions act as catalytic agents in providing alternative education services, building cross-sector partnerships and bridging marginalized groups with the formal education system. The findings also indicate that the effectiveness of interventions depends on synergies between economic, spatial and institutional dimensions. The research emphasizes the importance of collaborative models between social institutions, local governments and the private sector in designing inclusive and sustainable education policies. Recommendations point to the need for longitudinal studies to evaluate the implementation of SDGs-based education policies in areas with high disparities.*

---

**Keywords:** *Social Institutions, Educational Inequality, Poverty Reduction*

---

## **A. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan isu utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa setiap negara terpengaruh secara merata, variasi dalam tingkat dan jumlah penduduk miskin terdapat di setiap negara. Hampir tidak ada negara yang sepenuhnya terhindar dari masalah ini. Bahkan, negara-negara yang kaya dan berkembang dalam ilmu pengetahuan serta industri juga masih menghadapi kemiskinan meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Faradilla et al., 2024). Kemiskinan adalah isu yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen yang saling berhubungan. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang atau sebuah keluarga untuk memenuhi keperluan dasar mereka secara finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh pada akses kepada layanan pendidikan dan kesehatan, norma-norma sosial, serta kesempatan dalam komunitas (Pratama, 2023).

Kemiskinan tidak hanya sekadar isu keuangan. Ini meliputi keterjangkauan terhadap pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang cukup, tempat tinggal yang memadai, serta pekerjaan yang stabil. Kemiskinan juga menunjuk pada minimnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Banyak anak dari keluarga yang kurang mampu mungkin mengalami kendala dalam memperoleh pendidikan yang sesuai, yang akan memengaruhi prospek masa depan mereka (Pratama, 2023).

Kesenjangan pendidikan merupakan bentuk ketidaksetaraan akses, partisipasi, dan kualitas layanan pendidikan yang dialami oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Kemiskinan memainkan peran sentral dalam memperlebar kesenjangan ini, karena terbatasnya pendapatan rumah tangga membatasi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak dan mengakses fasilitas yang memadai (Sirait & Leorince, 2024). Dalam banyak kasus, kemiskinan tidak hanya menciptakan hambatan material seperti kurangnya buku dan sarana belajar, tetapi juga membatasi aspirasi dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan intergenerasional di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami hambatan yang sama dalam mencapai pendidikan tinggi seperti yang dialami oleh generasi sebelumnya (White & Lee, 2020).

Selain faktor ekonomi, ketimpangan geografis juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi akses terhadap pendidikan. Letak geografis, seperti tinggal di daerah terpencil, pegunungan, atau perdesaan, berdampak langsung terhadap ketersediaan lembaga pendidikan, jarak tempuh siswa, dan kualitas layanan pendidikan yang diterima (Aziza et al., 2025). Ketimpangan ini seringkali diperburuk oleh kelemahan dalam infrastruktur transportasi dan rendahnya perhatian kebijakan terhadap daerah pinggiran. Sebaliknya, inklusi sosial dalam pendidikan merupakan prinsip yang menekankan keterlibatan penuh dan setara bagi semua kelompok sosial, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi, budaya, atau disabilitas. Dalam konteks ini, lembaga sosial memainkan peran penting sebagai agen perubahan yang dapat menjembatani ketimpangan sosial dan spasial tersebut (Köse et al., 2023).

Ketimpangan geografis terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap akses dan capaian pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa siswa yang tinggal dalam radius 10 kilometer dari universitas memiliki kemungkinan jauh lebih tinggi untuk mendaftar dibandingkan mereka yang tinggal sejauh 40 kilometer, dengan rasio peluang mencapai 10,89. Temuan serupa di Italia menunjukkan bahwa akses geografis terhadap pendidikan menengah atas masih menjadi hambatan besar bagi siswa pedesaan, yang tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan infrastruktur digital atau status ekonomi (Bruno et al., 2022). Di Tiongkok, praktik konsolidasi sekolah dasar di wilayah pedesaan justru memperburuk akses karena siswa harus menempuh jarak lebih jauh melintasi medan yang sulit, memperlihatkan ketidakadilan spasial dalam distribusi lembaga pendidikan (Zhu et al., 2023). Sementara itu, Analisis lokasi merupakan sarana yang penting untuk menentukan pola-pola lokasi dalam mutu pendidikan. Regresi lokasi, contohnya, merupakan suatu metode statistik yang memfasilitasi pemahaman hubungan antara variabel dengan memperhitungkan jarak geografis dapat secara signifikan meningkatkan akses pendidikan (R. Jannah, 2025).

Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan melalui kebijakan inklusif sering kali menghadapi hambatan struktural, metodologis, dan politik yang kompleks. Secara struktural, banyak kerangka hukum dan kebijakan lebih berpihak kepada kelompok berpengaruh, sehingga kebijakan

redistributif sulit dijalankan secara efektif (Weisbach, 2023). Selain itu, keterbatasan alokasi sumber daya sosial menyebabkan lemahnya dukungan terhadap kelompok marjinal (Eliakimu & Mans, 2022). Dari sisi metodologis, alat ukur yang digunakan dalam evaluasi sering gagal mencerminkan realitas hidup kelompok disabilitas, menyebabkan mereka terpinggirkan dalam kebijakan intervensi (Atkin et al., 2023). Kebijakan kesetaraan gender juga sering tidak mempertimbangkan kerangka interseksionalitas, sehingga tidak efektif menjawab kebutuhan kelompok yang mengalami beragam bentuk kerentanan (Jiménez Rodrigo, 2020). Resistensi politik dari kelompok elite terhadap kebijakan yang dinilai mengancam kepentingan mereka semakin memperumit penerapan kebijakan yang progresif dan berkeadilan (Green & Healy, 2022).

Dalam konteks keterbatasan kebijakan formal, lembaga sosial berperan sebagai penggerak alternatif dalam mendorong inklusi pendidikan. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga sebagai ruang solidaritas dan penguatan kemampuan manusia melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal (Abdullah, 2022). Di Australia, misalnya, kebijakan penghapusan segregasi pendidikan dilaksanakan melalui dukungan lembaga masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan struktural (Carrington et al., 2022). Di berbagai negara, telah berkembang model pusat pendidikan inklusif yang menggabungkan layanan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus, meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka (A. M. Jannah et al., 2021). Solidaritas dalam ruang pendidikan juga menjadi praktik penting yang mendorong dialog, kerjasama, dan empati antar siswa, memperkuat nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sosial (Arteaga et al., 2020).

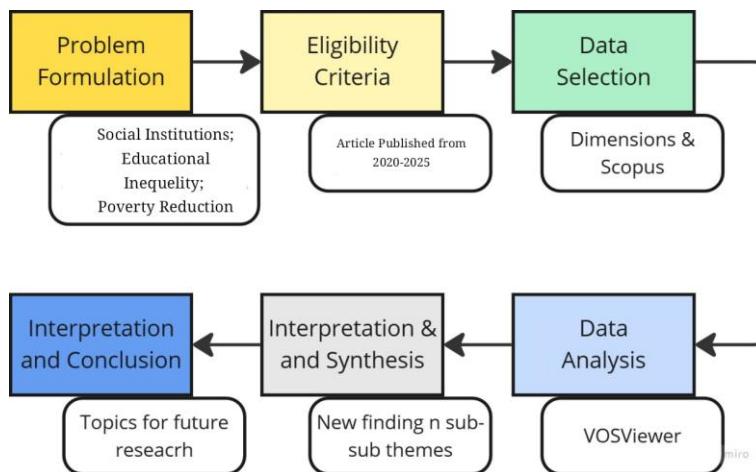
Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pengaruh kemiskinan, ketimpangan geografis, dan keterbatasan kebijakan terhadap kesenjangan pendidikan, masih terdapat kekosongan dalam memahami secara sistematis bagaimana lembaga sosial dapat berperan secara strategis dan terstruktur dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada peran negara atau faktor individu, sementara kontribusi lembaga sosial dalam membangun tata kelola pendidikan yang adil, kolaboratif, dan berbasis komunitas masih jarang dijadikan fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji

secara mendalam **peran lembaga sosial dalam mengatasi kesenjangan pendidikan akibat kemiskinan**, dengan menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas, kemitraan lintas sektor, dan integrasi kelembagaan yang berkelanjutan.

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Akibat Kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 6 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Akibat Kemiskinan.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Akibat Kemiskinan; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



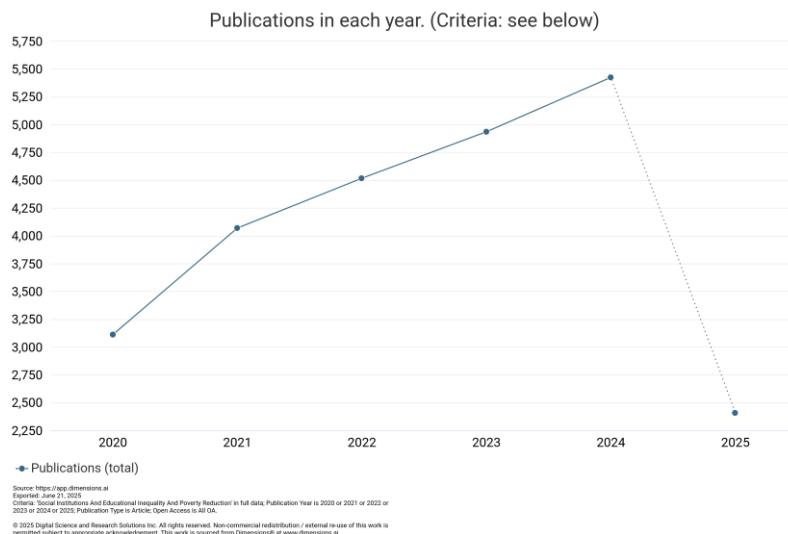
**Gambar 1.** Prosedur penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Akibat Kemiskinan. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti "(Lembaga Sosial dan Kesenjangan pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan) OR (Social Institutions AND Educational Inequality AND Poverty Reduction)". Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimporkan ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Akibat Kemiskinan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 367,875 data, meliputi data *open access* sebanyak 73,257 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 73,257 data tersebut, terdapat 43,846 data merupakan artikel dan 29,404 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 24,463 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.

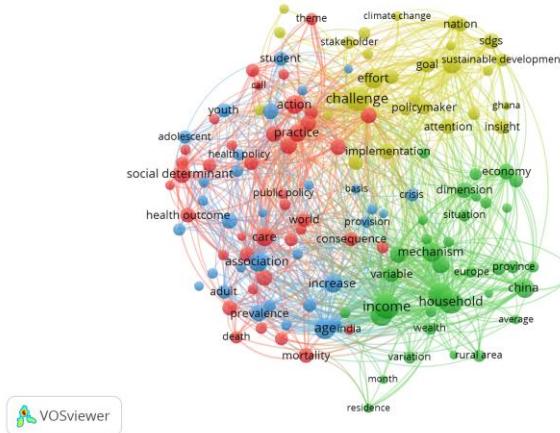


**Gambar 2.** Distribusi jumlah data selama satu dekade

Gambar 2 menunjukkan bahwa tren jumlah publikasi dari tahun 2020 hingga 2025 yang berkaitan dengan topik "Social Institutions And Educational Inequality and Poverty Reduction", berdasarkan data dari Dimensions.ai. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024. Pada tahun 2020, jumlah publikasi berada di kisaran 3.100, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 dan terus bertambah setiap tahun hingga mencapai sekitar 5.500 publikasi pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025, terdapat penurunan yang sangat tajam dengan jumlah publikasi turun drastis menjadi sekitar 2.300. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa data untuk tahun 2025 belum lengkap, mengingat grafik ini diekspor pada tanggal 21 Juni 2025, sehingga publikasi yang akan dirilis di paruh kedua tahun tersebut belum tercatat sepenuhnya. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan pertumbuhan minat terhadap topik tersebut dalam empat tahun terakhir, dengan catatan bahwa angka tahun 2025 masih bersifat sementara.

## 2. Network Visualization of Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Network visualization dari variabel penelitian

Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variable yang diteliti selama 6 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi dari setiap variabel adalah sebagai berikut :

- Green Cluster (Kemiskinan, Pendapatan Rumah Tangga, dan Kesenjangan Ekonomi)

Klaster hijau berfokus pada aspek struktural ekonomi seperti *income*, *household*, *wealth*, *rural area*, *province*, *china*, *europe*, *mechanism*, dan *dimension*. Kata kunci ini mengarahkan kita pada studi tentang ketimpangan ekonomi antar wilayah serta keterkaitannya dengan kondisi rumah tangga. Interpretasi; Klaster hijau menggambarkan hubungan antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan ketimpangan sosial. Fokus pada "income", "household", dan "wealth" menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi salah satu akar dari permasalahan sosial lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan. Aspek spasial juga menjadi perhatian, misalnya ketimpangan antar wilayah seperti rural area atau antar negara seperti china dan india.

- Blue Cluster (Analisis Data Kesehatan dan Implikasi Demografis)

Dalam klaster biru, muncul kata seperti *social determinant*, *health outcome*, *age*, *death*, *adult*, dan *provision*. Ini menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial yang menentukan kondisi kesehatan dan Pendidikan. Interpretasi; Klaster ini menekankan aspek kuantitatif dan analitis dari studi kesehatan masyarakat. Penggunaan istilah

seperti "variable", "association", dan "basis" menunjukkan pendekatan berbasis data dan statistik dalam memahami relasi antara determinan sosial dan hasil kesehatan. Klaster ini juga menghubungkan aspek demografis seperti usia dan kelompok pendidikan dalam analisis kebijakan publik.

c. Red Cluster (Kesehatan Masyarakat dan Ketimpangan Sosial)

Klaster ini mendominasi pada *practice, action, public policy, health policy, care, association, prevalence, mortality, and health outcome*. Interpretasi: Klaster ini merepresentasikan dimensi sosial-kesehatan dalam konteks ketimpangan. Fokus utamanya adalah pada determinan sosial kesehatan dan praktik-praktik kebijakan kesehatan publik. Kata-kata seperti "prevalence", "mortality", dan "health outcome" menunjukkan perhatian terhadap dampak ketimpangan sosial terhadap status kesehatan kelompok rentan (anak, remaja, dewasa). Klaster ini juga menyinggung peran kebijakan publik (*health policy*) dan implikasinya terhadap layanan dan hasil kesehatan.

d. Yellow Cluster (Kebijakan Global dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan)

Klaster ini memuat kata seperti *challenge, stakeholder, sdgs, goal, nation, climate change, sustainable development, and policymaker*. Klaster ini mencerminkan diskursus global mengenai pembangunan inklusif dan peran lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendidikan melalui kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Interpretasi: Klaster ini menunjukkan kerangka makro dan normatif terkait keberlanjutan, tantangan kebijakan global, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Klaster ini relevan dengan diskursus global tentang pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, yang membutuhkan sinergi antar bangsa, pemangku kepentingan, dan membuat kebijakan. Fokusnya adalah pada tantangan implementatif dari berbagai *goal* yang telah ditetapkan di tingkat internasional..

Berdasarkan pembagian klaster tersebut, para peneliti dapat melakukan studi yang lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut :

**a. Dinamika Ketimpangan Ekonomi sebagai Akar Kesenjangan Pendidikan**

Distribusi pendapatan rumah tangga memiliki keterkaitan yang erat dengan akses terhadap pendidikan, di mana pendidikan berperan sebagai

determinan utama dalam pembentukan status ekonomi suatu keluarga. Beberapa penelitian menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dalam suatu keluarga, semakin besar pula potensi pendapatan rumah tangga, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki korelasi lebih kuat antara pendidikan dan penghasilan (N. Li, 2023). Kebijakan investasi pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia turut berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dengan memperkuat daya saing individu di pasar tenaga kerja (Xu, 2024). Namun, dalam konteks negara berkembang seperti India, disparitas sosial-ekonomi dan geografis masih membatasi akses pendidikan prasekolah bagi kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga memperkuat transmisi ketimpangan pendidikan lintas generasi (Choudhury et al., 2023); (X. Li et al., 2023).

Ketimpangan geografis juga menjadi faktor determinan dalam ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa lokasi geografis yang terpencil atau secara struktural tertinggal memiliki keterbatasan dalam infrastruktur pendidikan, seperti di Godomey dan berbagai wilayah pedesaan di India, yang menyebabkan kesenjangan literasi dan keterlambatan pencapaian Pendidikan (Laurent Sévimi Coffi Éric et al., 2022); (Takher, 2024). Faktor jarak dan keterjangkauan institusi pendidikan tinggi terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi mahasiswa, sebagaimana diungkap dalam studi (White & Lee, 2020). Selain itu, studi yang dilakukan di Inggris dan Tiongkok menegaskan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas atau wilayah yang kurang berkembang cenderung menempuh pendidikan di institusi yang memiliki kualitas lebih rendah, mencerminkan interaksi antara faktor geografis dan status sosial ekonomi (Cara, 2022); (Han et al., 2023).

Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi bukan hanya memengaruhi daya beli keluarga terhadap pendidikan, melainkan juga memperluas jarak struktural yang membatasi akses pendidikan yang berkualitas bagi kelompok rentan. Keterbatasan pendapatan menyebabkan rendahnya investasi keluarga dalam pendidikan anak, sedangkan lokasi geografis memperparah ketimpangan tersebut melalui minimnya infrastruktur dan akses layanan pendidikan. Situasi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketimpangan pendidikan, di mana generasi berikutnya mewarisi keterbatasan yang sama. Dengan demikian, dinamika ketimpangan ekonomi harus dipahami sebagai akar sistemik dari kesenjangan pendidikan, yang hanya dapat diatasi melalui

intervensi kebijakan yang menyasar secara simultan aspek ekonomi, spasial, dan kelembagaan.

### **b. Peran Strategis Lembaga Sosial dalam Merespons Ketimpangan**

Intervensi lembaga sosial dalam penyediaan layanan pendidikan alternatif memainkan peran krusial dalam mengurangi disparitas pendidikan serta meningkatkan retensi siswa, khususnya di kalangan kelompok rentan. Pekerja sosial berperan penting dalam menurunkan angka putus kuliah dengan mengatasi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan personal yang memengaruhi partisipasi siswa dalam pendidikan tinggi (Santana & Montesdeoca, 2021). Dukungan non-akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan sosial terbukti meningkatkan kinerja akademik dan kemampuan adaptasi sosial siswa migran (Qiang et al., 2022). Metodologi pendidikan alternatif, seperti *Learning-Service*, yang mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam pembelajaran akademik, menunjukkan efektivitas dalam membangun keterampilan sosial dan praktik inklusi pada mahasiswa pendidikan jasmani maupun psikologi (Solà Santesmases, 2022); (Quiterio et al., 2023). Pendidikan formal, informal, dan non-formal yang terintegrasi dalam sistem kelembagaan pendidikan turut memperluas cakupan transformasi sosial yang menyasar keberagaman latar belakang peserta didik (Abdullah, 2022).

Kerja sama lintas sektor antara lembaga sosial dan pemerintah kian diakui sebagai pendekatan strategis dalam menjawab tantangan sosial yang kompleks, termasuk dalam bidang pendidikan. Model kolaborasi ini melibatkan kemitraan antara sektor publik, lembaga non-profit, dan swasta dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik. Beragam bentuk kolaborasi, seperti *Public-Private Partnership (PPP)*, outsourcing layanan, hingga penyedia layanan publik independen, memberikan karakteristik tata kelola yang adaptif (Qaedi Aqsa & Nugroho, 2023). Pengukuran efektivitas kolaborasi lintas sektor di Indonesia, khususnya dalam pencegahan stunting, menunjukkan pentingnya indikator tata kelola, administrasi, dan kemitraan yang tervalidasi secara statistik (Balqis et al., 2024). Studi kasus respons COVID-19 di Singapura dan transisi energi di Jerman menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas sektor bergantung pada tujuan bersama, kepercayaan timbal balik, dan mekanisme koordinasi yang fleksibel (Kim et al., 2022); (Behnke & Hegele, 2024).

Interpretasi dari rangkaian temuan ini menegaskan bahwa lembaga sosial memiliki posisi strategis sebagai aktor transformatif dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Peran mereka tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan alternatif, tetapi juga sebagai penghubung antara komunitas marjinal dan sistem pendidikan formal yang lebih luas. Kolaborasi lintas sektor memperluas kapasitas kelembagaan untuk menjangkau kelompok rentan, terutama ketika pemerintah sendiri menghadapi keterbatasan struktural. Namun demikian, keberhasilan strategi ini bergantung pada harmonisasi kebijakan, sinergi antar aktor, dan penghapusan sekat birokrasi yang masih menghambat inovasi layanan. Dengan demikian, peran strategis lembaga sosial dalam merespons ketimpangan menjadi krusial dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### **c. Transformasi Kebijakan dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.**

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam kebijakan pendidikan menjadi langkah strategis dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Berbagai kerangka pendidikan global telah mengadopsi prinsip-prinsip SDGs sebagai inti dari reformasi kebijakan, sebagaimana terlihat dalam *National Education Policy 2020* India yang menekankan inklusivitas dan akses pendidikan berkualitas sebagai wujud komitmen terhadap SDG 4 (Tushar Dhar Shukla et al., 2023), serta *European Green Deal* yang menempatkan pendidikan berkelanjutan sebagai instrumen utama dalam menghadapi perubahan iklim dan membentuk kewarganegaraan global (Zotti, 2022). Pada tingkat pendidikan tinggi, universitas di Eropa dan Amerika Latin semakin banyak mengintegrasikan SDGs ke dalam kurikulum dan kegiatan penelitian, memperkuat kontribusi lembaga pendidikan terhadap pembangunan berkelanjutan (Alcántara-Rubio et al., 2022). Selain itu, pendidikan lingkungan berbasis SDGs telah dikembangkan untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan, sebagaimana diusulkan dalam kebijakan pendidikan lingkungan di Meksiko (Bravo Serrano & Rangel Ángeles, 2023).

Meskipun komitmen terhadap TPB dalam sektor pendidikan terus meningkat, implementasi kebijakan yang inklusif masih menghadapi tantangan struktural di berbagai konteks. Minimnya sumber daya fisik yang ramah disabilitas menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pendidikan inklusif, sementara sektor industri juga terkendala dalam mewujudkan praktik berkelanjutan karena keterbatasan finansial dan teknologi (Bibiana et al., 2020); (Kindzers'kyi, 2020). Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menjadi hambatan signifikan dalam

mendukung siswa berkebutuhan khusus (Prathama et al., 2022); (Arias et al., 2023). Kebijakan yang ada pun seringkali tidak memiliki kerangka kerja yang kuat dan mekanisme penegakan yang efektif, mengakibatkan penerapan yang tidak merata antar wilayah dan institusi (Ab Rahman & Abd Aziz, 2020). Tanpa dukungan pemerintah yang solid dan panduan pelaksanaan yang jelas, kebijakan inklusif sulit mencapai tujuannya.

Interpretasi dari hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan menuju pembangunan berkelanjutan tidak hanya memerlukan komitmen normatif, tetapi juga reformasi struktural yang menjawab hambatan implementatif secara konkret. Integrasi SDGs ke dalam kebijakan pendidikan merupakan inisiatif penting, namun tanpa dukungan berupa pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan operasional yang kuat, maka pelaksanaannya berisiko menjadi simbolik semata. Transformasi ini menuntut pendekatan sistemik, yakni sinergi antara lembaga pendidikan, sektor industri, dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, terukur, dan adaptif. Dalam konteks ini, agenda pembangunan berkelanjutan harus dilihat sebagai proses dinamis yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis secara harmonis dalam sistem pendidikan dan tata kelola kebijakan.

#### **D. Conclusion**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan merupakan manifestasi dari dinamika ketimpangan ekonomi yang bersifat sistemik dan multidimensional. Ketimpangan pendidikan juga memiliki akar struktural yang kuat dalam dinamika ketimpangan ekonomi dan spasial, yang secara langsung mempengaruhi akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan. Keterbatasan pendapatan keluarga serta ketimpangan geografis memperdalam eksklusi pendidikan, khususnya bagi kelompok marginal. Dalam konteks ini, lembaga sosial memainkan peran strategis sebagai katalisator perubahan sosial melalui penyediaan layanan pendidikan alternatif dan jembatan akses menuju sistem pendidikan formal. Di sisi lain, transformasi kebijakan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) hanya akan efektif apabila dibarengi dengan reformasi struktural dan komitmen lintas sektor yang kuat. Oleh karena itu, intervensi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan harus memadukan dimensi ekonomi, spasial, dan kelembagaan secara simultan dan sinergis.

Urgensi riset masa depan terletak pada pengembangan model

integratif kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengurangi kesenjangan pendidikan akibat kemiskinan struktural. Selain itu, diperlukan studi longitudinal yang menilai efektivitas kebijakan pendidikan berbasis SDGs dalam menjangkau kelompok rentan di wilayah dengan disparitas geografis dan ekonomi tinggi.

### **Acknowledgment**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan artikel ini. Kami juga menyampaikan terima kasih secara khusus ditujukan kepada para penulis dan peneliti terdahulu, yang karya-karyanya menjadi landasan penting dan sumber inspirasi dalam pengembangan artikel ini. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan tulisan ini.

### **Daftar Pustaka**

- Ab Rahman, N. H., & Abd Aziz, S. N. (2020). Challenges in Implementing Inclusive Development Concept in Sustainable Development Goals 2030. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 26(2020), 15–25. <https://doi.org/10.17576/juum-2020-26-02>
- Abdullah, M. (2022). LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL (Studi Tentang Peran Lembaga Pendidikan di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). *Mamba'ul 'Ulum*, 18(1), 38–48. <https://doi.org/10.54090/mu.56>
- Alcántara-Rubio, L., Valderrama-Hernández, R., Solís-Espallargas, C., & Ruiz-Morales, J. (2022). The implementation of the SDGs in universities: a systematic review. *Environmental Education Research*, 28(11), 1585–1615. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2063798>
- Arias, C. R., Calago, C. N. S., Calungsod, H. F. B., Delica, M. A., Fullo, M. E., & Cabanilla, A. J. B. (2023). Challenges and Implementation of Inclusive Education in Selected Asian Countries: A Meta-Synthesis.

- International Journal of Research in Education and Science*, 9(2), 512–534. <https://doi.org/10.46328/ijres.3089>
- Arteaga, I. H., Vásquez, A. C. E., López, K. M. F., & Nuzcue, E. J. M. (2020). Education and Solidarity: A Path towards Educational Inclusion. *HSE Social and Education History*, 9(3), 227–251. <https://doi.org/10.17583/HSE.2020.4310>
- Atkin, K., Berghs, M., & Chattoo, S. (2023). Representing disabling experiences: Rethinking quality of life when evaluating public health interventions. *Politics and Policy*, 51(1), 41–58. <https://doi.org/10.1111/polp.12515>
- Aziza, A. N., Mohzana, S. P., Fahrurrozi, M., SE, M. M., Wihardjo, E., Werdiningsih, R., Niron, Y. M. L., Rukmini, A., Arini, D. U., & MM, M. (2025). *PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL*. CV Rey Media Grafika.
- Balqis, B., Rahmadani, S., Abadi, M. Y., Rosmanely, S., Anwar, A., Trisasmita, L., Sulianderi, N. M. V., Fahmi, F., Arsin, A., Arfandi, M. A., Hamka, N. A., & Amaliah Amriani, A. S. (2024). Development of Cross-Sector Collaboration Indicators for Accelerating the Reduction of Stunting in South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Public Health and Pharmacy*, 4(3), 225–237. <https://doi.org/10.56338/jphp.v4i3.5924>
- Behnke, N., & Hegele, Y. (2024). Achieving cross-sectoral policy integration in multilevel structures—Loosely coupled coordination of “energy transition” in the German “Bundesrat.” *Review of Policy Research*, 41(1), 160–183. <https://doi.org/10.1111/ropr.12551>
- Bibiana, R. I., Madrine, K., Eric, W., & Simon, T. (2020). Structural modification challenges facing the implementation of inclusive education policy in public secondary schools in Tharaka-Nithi County. *International Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 12(2), 147–158. <https://doi.org/10.5897/ijeaps2020.0661>
- Bravo Serrano, A. Y., & Rangel Ángeles, M. T. (2023). Propuesta para la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la educación ambiental en México. *Gestión y Estrategia*, 63.
- Bruno, G., Cavola, M., Diglio, A., & Piccolo, C. (2022). Geographical accessibility to upper secondary education: an Italian regional case study. *Annals of Regional Science*, 69(2), 511–536. <https://doi.org/10.1007/s00168-022-01146-6>
- Cara, O. (2022). Geography Matters: Explaining Education Inequalities of Latvian Children in England. *Social Inclusion*, 10(4), 79–92. <https://doi.org/10.17645/si.v10i4.5809>
- Carrington, S., Lassig, C., Maia-Pike, L., Mann, G., Mavropoulou, S., &

- Saggers, B. (2022). Societal, systemic, school and family drivers for and barriers to inclusive education. *Australian Journal of Education*, 66(3), 251–264. <https://doi.org/10.1177/00049441221125282>
- Choudhury, P. K., Joshi, R., & Kumar, A. (2023). Regional and socioeconomic inequalities in access to pre-primary education in India: evidence from a recent household survey. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s40723-023-00117-4>
- Eliakimu, E. S., & Mans, L. (2022). Addressing Inequalities Toward Inclusive Governance for Achieving One Health: A Rapid Review. *Frontiers in Public Health*, 9(January), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.755285>
- Faradilla, I., Putra, M. A. R., & Pratama, I. N. (2024). Implementasi Kebijakan Penangulangan Kemiskinan Dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lombok Timur. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 3, 887–895.
- Green, F., & Healy, N. (2022). How inequality fuels climate change: The climate case for a Green New Deal. *One Earth*, 5(6), 635–649. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.005>
- Han, Y., Ni, R., & Gao, J. (2023). Regional Inequality of Higher Education Development in China: Comprehensive Evaluation and Geographical Representation. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15031824>
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Model layanan pendidikan inklusif di Indonesia. *Anwarul*, 1(1), 121–136.
- Jannah, R. (2025). EVALUASI KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR MELALUI KLASIFIKASI SPASIAL DENGAN NEURAL NETWORK. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 10(2), 1743–1752.
- Jiménez Rodrigo, M. L. (2020). Posibilidades de la investigación documental para el análisis interseccional de las políticas de igualdad. *Investigaciones Feministas*, 11(2), 319–331. <https://doi.org/10.5209/infe.66080>
- Kim, S., Goh, Y., & Kang, J. H. B. (2022). Moving toward a common goal via cross-sector collaboration: lessons learned from SARS to COVID-19 in Singapore. *Globalization and Health*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12992-022-00873-x>
- Kindzers'kyi, Y. (2020). Policy of Inclusive and Sustainable Industrialization: the Challenges and Priorities of Implementation.

- Economic Analysis*, 0259(30(1, Part 1)), 105–117.  
<https://doi.org/10.35774/econa2020.01.01.105>
- Köse, M., Erdem, C., Koçyigit, M., & Jega, M. I. (2023). A Geospatial Analysis of Accessibility to Primary Education. *Journal of Theoretical Educational Science*, 16(2), 352–371.
- Laurent Sévimi Coffi Éric, S. V., Jean-Eudes, H. S., Pamphile, S. D., & Julienne Brillante, H. H. (2022). Disparités D'aménagement des Infrastructures Scolaires Publiques dans l'Arrondissement de Godomey (Communes d'Abomey-Calavi): Facteurs Explicatifs et Défis pour la Scolarisation des Enfants. *European Scientific Journal, ESJ*, 18(29), 110. <https://doi.org/10.19044/esj.2022.v18n29p110>
- Li, N. (2023). Analysis of the Impact of Family Education Level on Household Income: A Study Based on the CHFS Database. *International Journal of Accounting and Finance Studies*, 6(1), p50. <https://doi.org/10.22158/ijafs.v6n1p50>
- Li, X., Xie, W., Wang, L., & Zou, T. (2023). Can impoverished family nurture rich sons any more? The effect of household income on intergenerational transmission of education: Evidence from China. *Frontiers in Psychology*, 14(February), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1116217>
- Pratama, I. N. (2023a). Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. *Journal Law and Government*, 1(2), 143–153.
- Pratama, I. N. (2023b). Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 2, 1216–1222.
- Prathama, S. K., Kusumaningrum, S. R., & Dewi, R. S. I. (2022). Problems With The Implementation Of Inclusive Education Policies For Students With Special Needs In Public Schools. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 986–995.
- Qaedi Aqsa, & Nugroho, B. Y. (2023). A Literature Review: Cross-Sector Collaboration Arrangements to Deliver Public Services and Goods. *Technium Social Sciences Journal*, 40, 1–10. <https://doi.org/10.47577/tssj.v40i1.8342>
- Qiang, H., Liu, L., & Ma, F. (2022). Neglected Part of Education Sustainability: Social Work Intervention on the Quality of Extracurricular Life of Migrant Workers' Children. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/su14052486>
- Quiterio, P. L., Carvalho, R. L. R., & Carmo, M. M. I. do B. do. (2023). Programa de Promoção das Habilidades Sociais para Universitários de Psicologia com Foco na Educação Inclusiva. *Revista de Ensino*,

- Educação e Ciências Humanas*, 24(1), 115–124.  
<https://doi.org/10.17921/2447-8733.2023v24n1p115-124>
- Santana, C. Á., & Montesdeoca, D. C. (2021). LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LA TUTORÍA ESTUDIANTIL COMO MEDIDA DE DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, PERÍODO 2015-2019. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada "YACHASUN,"* 5(8), 2697-3456.
- Sirait, J. E., & Leorince, L. (2024). Institusi Pendidikan Kristen Sebagai Pilar Kemerdekaan Pendidikan Di Indonesia. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 9(2), 207–231.
- Solà Santesmases, J. (2022). Aprendizaje-Servicio en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: buenas prácticas de Educación Física en colectivos vulnerables. *Didacticae: Revista de Investigación En Didácticas Específicas*, 12, 7–20.  
<https://doi.org/10.1344/did.2022.12.7-20>
- Takher, S. (2024). *Educational Disparities in India 's Union Territories : Infrastructure , Literacy and Policy Needs*. 9(4), 130–138.
- Tushar Dhar Shukla, Harsharan Singh, Aadarsh Bishnoi, & Ashutosh Singh Padda. (2023). Alignment of India's National Education Policy 2020 with the United Nations' Sustainable Development Goals: A Path towards Quality Education for All. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 19(3), 049–054.  
<https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.19.3.1768>
- Weisbach, D. (2023). Constrained Income Redistribution and Inequality: Legal Rules Compared to Taxes and Transfers. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4328824>
- White, P. M., & Lee, D. M. (2020). Geographic Inequalities and Access to Higher Education: Is the Proximity to Higher Education Institution Associated with the Probability of Attendance in England? *Research in Higher Education*, 61(7), 825–848. <https://doi.org/10.1007/s11162-019-09563-x>
- Xu, R. (2024). Study on the Dynamic Relationship between Education Investment Policies and Income Distribution. *International Journal of Education and Humanities*, 14(1), 126–133.  
<https://doi.org/10.54097/ken9qr72>
- Zhu, Y., Zinda, J. A., Liu, Q., Wang, Y., Fu, B., & Li, M. (2023). Accessibility of Primary Schools in Rural Areas and the Impact of Topography: A Case Study in Nanjiang County, China. *Land*, 12(6).  
<https://doi.org/10.3390/land12061134>

- Zotti, S. (2022). Education and the European Green Deal: Strengthening Sustainability Education in the EU. *International Journal of Contemporary Education*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.11114/ijce.v5i2.5544>